

---

## Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021

Ni Luh Putu Sandrya Dewi\*, Ni Luh Gde Novitasari dan Muhammad Devin Ardiansyah

Universitas Mahasaraswati, Denpasar-Indonesia

\*sandryadewipt89@unmas.ac.id

### How to cite (in APA style):

Dewi, N. L. P. S., Novitasari, N. L. G., & Ardiansyah, M. D. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 22(1), pp.67-81. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81>

### Abstract

Over the past five years, the percentage of tax revenue has fluctuated, starting in 2017 by 89.40%, increasing in 2018 to 92.41% and then decreasing to 84.44% in 2019 and in the last two years it has increased to 89.25% and 100, 18%, so it can be said that the realization of tax revenue has not been maximized. Paying taxes is a burden, so many companies choose to manipulate their taxes by carrying out tax avoidance. Tax avoidance is a practice of legal tax avoidance by exploiting loopholes in tax regulations. This study aims to examine the effect of the proportion of independent commissioners, audit committees, institutional ownership, sales growth and liquidity on tax avoidance in manufacturing companies from 2019 to 2021. The population in this study totaled 193 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). ) years 2019 – 2021. The sample in this study was 73 companies which were determined based on a purposive sampling technique. The analysis technique used in this study uses multiple linear analysis. The results showed that the proportion of independent commissioners and audit committees had a negative effect on tax avoidance while institutional ownership, sales growth and liquidity had no effect on tax avoidance. Future research is expected to use other variables because in this study there are 3 variables that have no effect.

**Keywords:** Tax avoidance, Proportion of Independent Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership, Sales growth.

### Abstrak

Sepanjang lima tahun terakhir capaian penerimaan pajak mengalami fluktuatif persentase mulai tahun 2017 sebesar 89,40% meningkat pada tahun 2018 menjadi 92,41% lalu menurun menjadi 84,44% tahun 2019 dan dua tahun terakhir mengalami peningkatan yakni 89,25% dan 100,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Membayar pajak merupakan beban maka banyak perusahaan memilih untuk merekayasa pajaknya dengan cara melakukan tax avoidance. Tax avoidance merupakan suatu praktik penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, sales growth dan likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur tahun 2019 – 2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2021.. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 perusahaan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance sedangkan kepemilikan institusional, sales growth dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain karena dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh.

**Kata Kunci:** Tax avoidance, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Sales growth.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan di dalam suatu negara perlu memiliki daya yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya di Indonesia. salah satu sumber daya pendapatan tersebut berasal dari pajak. Penerimaan pajak yang besar menggambarkan bahwa suatu Negara memiliki perekonomian yang kuat karena pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut.

Tabel 1

Capaian realisasi penerimaan pajak

Tahun	Target (triliun)	Realisasi (triliun)	Capaian
2017	1.283	1.147	89,40%
2018	1.424	1.315,90	92,41%
2019	1577,56	1332,06	84,44%
2020	1198,82	1069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.231,87	100,18%

Sumber: kemenkeu.go.id (2022)

Berdasarkan informasi seperti yang disajikan di atas, sepanjang 5 tahun terakhir capaian penerimaan pajak mengalami fluktuatif persentase sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Pada tahun 2017 presentase capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 89,40% kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 92,41% lalu menurun menjadi 84,44% tahun 2019 dan pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yakni tahun 2020 sebesar 89,25% dan 2021 sebesar 100,18%. Warga akan berusaha untuk mengurangi berapa banyak penilaian dengan cara yang sah atau melanggar hukum untuk mencapai peningkatan target laba yang ditentukan setiap tahun dengan kualitas produk terbaik yang dapat diberikan perusahaan (Kharimah dan Sutandi, 2019).

Membayar pajak merupakan beban bagi perusahaan maka banyak perusahaan memilih untuk merekayasa pajaknya dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau pun penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut (Jacob, 2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah strategi perusahaan dalam meminimalisir jumlah beban pajak yang dibayarkan kepada negara dengan tidak terlepas dari peraturan-perundang-undangan yang melainkan hanya mencari celah yang dimanfaatkan perusahaan demi dapat melakukan penghindaran pajak. Berkurangnya penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga timbul lah stigma negatif terhadap perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karena pembangunan daerah menjadi tidak maksimal (lestari dan Putri, 2017). Namun, menurut Direktorat Jenderal Pajak pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku *tax avoidance* ini mencari celah-celah dan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang meskipun tindakan ini merugikan negara.

Di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* seperti yang diberitakan dalam liputan kontan.co.id.-jakarta, Lembaga *Tax Justice Network* pada tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Kedua, PT Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Seharusnya pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan

adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (kontan.co.id tahun 2022).

*Tax avoidance* bisa terjadi karena adanya konflik kepentingan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) ini berguna bagi pemegang saham atau investor dalam melindungi kepemilikan sahamnya apabila terdapat perbedaan kepentingan antara 2 belah pihak yakni investor dan manajemen perusahaan. Disinilah pentingnya proporsi dewan komisaris independen menentukan akan jalannya perusahaan menjadi jalan tengah mengenai keputusan yang akan diambil. Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali. Serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan dewan komisaris independen berfungsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dari tindakan peluang manajemen dalam melakukan *tax avoidance* sehingga perusahaan akan mencapai tujuan yang lebih baik (Umam dan Ginanjar, 2020). Hasil penelitian Wulandewi (2020), Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Anisa (2017) yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Tamara (2020) menyatakan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Semakin ketatnya pengawasan suatu manajemen dalam menghasilkan suatu informasi yaitu laporan keuangan. Disinilah peran dari komite audit dalam meminimalisir kecurangan pelaporan keuangan khususnya pajak demi membantu dewan komisaris independen. Komite audit memiliki wewenang dalam mengawasi manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Komite audit dipilih oleh dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Tamara, 2020). Tanggung jawab komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan kebijakan keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan. Keadaan inilah yang menjadikan manajemen perusahaan untuk bersikap serakah dengan mengecilkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian Serafim dan Karmudiandri (2021), Nugraheni dan Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian Astuti (2020) mengungkapkan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penerapan *Corporate Governance* dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi dari struktur kepemilikan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain (Fatimah, 2018). Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Jika pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih optimal maka kecil kecenderungan atau kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Dewi dan Suardika, 2021). Hasil penelitian Astuti (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan dalam penelitian Moeljono (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Sales growth* merupakan perkembangan tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ketahun. Meningkatnya penjualan berdampak juga pada pertumbuhan laba. Dalam upaya meningkatkan laba biasanya perusahaan akan melakukan *tax avoidance* karena disisi lain *sales growth* meningkat maka beban pajak akan meningkat pula (Trisianto dan Oktaviani, 2016). Menurut penelitian Pratiwi (2019), Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda pula dengan penelitian menurut Putri (2021)

menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010:241). Likuiditas sangat berpengaruh pada agresivitas pajak karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang baik, perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah maka perusahaan tersebut akan tidak taat terhadap pembayaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas dari pada membayar pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Hasil penelitian Putra (2018) dan Noviani (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda halnya dengan penelitian Alam dan Fidiana (2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 – 2021, Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?, Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?, Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021? dan Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?

## II. KONSEP DAN HIPOTESIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pada penelitian ini menggunakan teori agensi dikarenakan teori ini menjelaskan adanya kecenderungan perbedaan tujuan antara *agent* dan *principal*, dikarenakan setiap individu pasti memiliki sifat egoisnya masing-masing. Menurut Scot (2003:305) mengatakan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi seperti kontrak yang menghubungkan antara satu orang atau lebih (*Principal*) mendelegasikan kewenangan kepada orang lain (*agent*) dalam membuat keputusan dan atas nama *principal*. Dalam lingkup korporasi yang dimaksudkan sebagai *principal* adalah pemilik saham sedangkan *agent* nya adalah seorang manajemen perusahaan. Informasi mengenai internal perusahaan akan lebih banyak diketahui oleh manajemen dibandingkan pemiliknya (*principal*).

### Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak berperan sebagai pengendali (Astuti, 2020). Setiap dewan komisaris independen yang bekerja memiliki independensi yang kuat karena tidak terhubung dengan kepentingan pemilik saham pengendali. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajer perusahaan dalam membuat sebuah keputusan termasuk dalam pajak, sehingga tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dihilangkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020), Astuti (2020) dan Alam dan Fidiana (2019) serta Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit telah menjadi unsur utama dalam *Good corporate governance* dengan jumlah minimal tiga orang di dalam setiap perusahaan. Semakin banyaknya komite audit artinya semakin

ketatnya pengawasan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan agar memiliki relevansi, kredibilitas dan independensi di dalamnya, sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan dapat dihindarkan. Komite audit bertugas dalam membantu Dewan Komisaris Independen selain melakukan pengawasan juga sebagai narahubung antara pihak eksternal, komisaris dan manajer perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020), Serafim dan Karmudiandri (2021), dan Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance***

Semakin besarnya jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen agar membuat keputusan yang dapat mensejahterakan seluruh pemilik saham, karena kepemilikan institusional merupakan perwakilan dari pemegang saham. Pemilik saham eksternal membatasi sikap manajer yang ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya sedangkan pemilik saham menginginkan kesejahteraan yang terjamin dari suatu perusahaan (Sari, 2021). Dengan adanya pengawasan kepemilikan institusional ini dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen untuk membuat laba sebesar-besarnya sehingga cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba bersih. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020), Tamara (2020), dan Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh *Sales growth* terhadap *Tax avoidance***

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Suatu perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Apabila *sales growth* mengalami pertumbuhan yang baik maka dapat disimpulkan *sales growth* mengalami peningkatan, dengan demikian laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan. Laba besar yang dimiliki oleh perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dari laba yang besar tersebut artinya perusahaan juga membayar beban pajak yang besar pula. *Sales growth* memberi gambaran untuk memprediksi penjualan perusahaan dimasa depan dan laba yang didapatkan sehingga memicu perusahaan untuk dapat melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) dan Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax avoidance***

Kinerja perusahaan yang baik pastinya memiliki kondisi keuangan yang baik pula sehingga banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian Noviani (2018) beranggapan bahwa semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh putra (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub> : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### III. METHOD

Lokasi ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2021. Penelitian ini diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian adalah sejumlah 193 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 perusahaan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo 2009:9). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui CETR (*Cash Efektif Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2009). Menurut Rist dan Pizzica (2015:54) rumus untuk menghitung *Tax avoidance* adalah sebagai berikut:

$$TA = \frac{\text{Jumlah pajak yang dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Dewan Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terhubung dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama dewan komisaris atau dewan direksi. Proporsi dewan komisaris independen, sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris agar memenuhi pedoman *Corporate Governance*. Menurut Dyas, *et al* (2016:5) dan Winata (2015:5) rumus untuk menghitung Proporsi Dewan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Komisaris}} \dots\dots\dots(2)$$

Pada umumnya komite audit ini memiliki fungsi dalam pengawasan laporan keuangan dan pengawasan internal karena bursa efek Indonesia mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di be harus memiliki komite audit yang diketuai oleh dewan komisaris independen. Jumlah komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan melihat dari banyaknya jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Kiswara (2013:38) untuk menganalisis komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan} \dots\dots\dots(3)$$

Kepemilikan institusional diasumsikan dimana institusi memiliki saham di perusahaan. Institusi tersebut bisa institusi pemerintahan, swasta, domestik maupun asing dan masyarakat umum yang memiliki saham diatas 5% (Widarjo, 2010). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Menurut Damayanti dan T. Susanto (2015:195) rumus untuk menghitung Kepemilikan Institusional adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \dots\dots\dots(4)$$

Pertumbuhan penjualan (*Sales growth*) merupakan cerminan hasil dari investasi masa lalu yang diprediksi sebagai pertumbuhan pada masa yang akan datang (Mahayasa, 2021). Suatu perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. *Sales growth* dapat diukur dengan penjualan bersih tahun berjalan dikurangi dengan penjualan bersih tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan bersih tahun sebelumnya. Menurut Kasmir (2016:107) rumus untuk menghitung *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$SG = \frac{\text{Net Sales t} - \text{Net Sales t-1}}{\text{Net Sales t-1}} \dots\dots\dots(5)$$

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas secara cepat. Menurut Sartono (2012:123). Likuiditas didefinisikan sebagai alat ukur perusahaan dalam membiayai kebutuhan dan kewajibannya dalam jangka waktu yang pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo disebut perusahaan yang likuid. Likuiditas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Menurut Hanafi dan Halim (2014:75) rumus untuk menghitung

Likuiditas (*current ratio*) adalah sebagai berikut :

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang lancar}} \dots\dots\dots(6)$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{PDKI} + \beta_2 \text{KA} + \beta_3 \text{KI} + \beta_4 \text{SG} + \beta_5 \text{L} + e \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

TA = *Tax avoidance*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KA = Komite Audit

KI = Kepemilikan Institusional

SG = *Sales growth*

L = Likuiditas

e = *Error Term*

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	219	.0017	5.7257	.403948	.7184062
PDKI	219	.25	.83	.4178	.10229
KA	219	1.00	4.00	3.0320	.27741
KI	219	.14	1.00	.7210	.18204
SG	219	-.96	14.71	.1349	1.01951
L	219	.61	312.79	5.6386	29.22380
Valid N (listwise)	219				

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1 yang merupakan hasil statistik deskriptif, dari data yang disajikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel *Tax avoidance* (TA) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar 0,0017. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 5,7257. Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 0,403948. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,7184062 lebih besar dari nilai *mean* sebesar 0,403948 yang berarti bahwa semakin tinggi terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar 0,25. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 0,83. Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 0,4178. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,10229 lebih kecil dari nilai *mean* sebesar 0,4178 yang berarti bahwa semakin rendah terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

Variabel Komite Audit (KA) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar 1,00. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 4,00. Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 3,0320. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,27741 lebih kecil dari nilai *mean* sebesar 3,0320 yang berarti bahwa semakin rendah terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

Variabel Kepemilikan Institusional (KI) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar 0,14. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 1,00. Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 0,7210. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,18204 lebih kecil dari nilai *mean* sebesar 0,7210 yang berarti bahwa semakin rendah terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

Variabel *Sales growth* (SG) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar -0,96. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 14,71, Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 0,1349. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 1,01951 lebih besar dari nilai *mean* sebesar 0,1349 yang berarti bahwa semakin tinggi terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

Variabel Likuiditas (L) menunjukkan banyaknya populasi (N) sebanyak 219 perusahaan. Nilai *minimum* merupakan nilai terendah sebesar 0,61. Nilai *maximum* merupakan nilai tertinggi sebesar 312,79. Nilai *mean* merupakan nilai rata-rata data sebesar 5,6386. Pada tabel standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 29,22380 lebih besar dari nilai *mean* sebesar 5,6386 yang berarti bahwa semakin tinggi terjadinya penyimpangan data terhadap nilai *mean*.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 2**  
Hasil analisis regresi linier berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	1.173	.163		7.195	.000		
1 PDKI	-.324	.017	-.735	-19.076	.000	.694	1.441
KA	-.241	.041	-.228	-5.895	.000	.686	1.457
KI	.012	.131	.003	.094	.925	.938	1.066
SG	-.014	.023	-.020	-.608	.544	.988	1.013
L	-.001	.001	-.037	-1.141	.255	.959	1.043

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$TA = 1,173 - 0,324PDKI - 0,241KA + 0,012KI - 0,014SG - 0,001L$$

Keterangan :

TA = *Tax avoidance*

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KA = Komite Audit

KI = Kepemilikan Institusional

SG = *Sales growth*

L = Likuiditas

Intepretasi dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Nilai konstanta dalam persamaan regresi diatas sebesar 1,173 menunjukkan apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KL), *Sales growth* (SG) dan Likuiditas (L) bernilai nol, maka besarnya nilai *Tax avoidance* (TA) adalah konstan sebesar 1,173.

Nilai koefisien regresi Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) sebesar -0,324. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) mengakibatkan penurunan *Tax avoidance* (TA) sebesar 0,324 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi Komite Audit (KA) sebesar -0,241. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Komite Audit (KA) mengakibatkan penurunan *Tax avoidance* (TA)



sebesar 0,241 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### Uji Normalitas

**Tabel 3**  
Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	N	Unstandardized Residual 219
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33631610
Most Extreme Differences	Absolute	.192
	Positive	.192
	Negative	-.184
	Test Statistic	.192
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.142 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,142 yang lebih besar dari pada  $> 0,05$  menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Sesuai dengan hasil uji pada tabel 2, menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hasil pengujian tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen layak digunakan sebagai prediktor.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 5**  
Hasil uji autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.884 <sup>a</sup>	.781	.776	.3402406	1.849
a. Predictors: (Constant), L, KA, SG, KI, PDKI					
b. Dependent Variable: TA					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,849 dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data ( $n$ ) = 219, serta  $k = 5$  ( $k$  adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $du$  sebesar 1,8229 dan nilai  $4 - du$  sebesar 2,1771. Oleh karena itu nilai  $dw$  berada pada  $du < dw < 4-du$  atau  $1,8229 < 1,849 < 2,1771$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6**  
Hasil uji heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		Beta			
(Constant)	2.383	2.940			.810	.419	
1 PDKI	.020	.306		.005	.066	.947	
KA	-.084	.738		-.009	-.114	.909	
KI	-2.092	2.357		-.063	-.888	.376	
SG	.005	.410		.001	.012	.990	
L	-.005	.015		-.025	-.360	.720	

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari pada sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

### Uji Model fit (Uji F)

**Tabel 7**  
Hasil uji model fit (uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.854	5	17.571	151.781	.000 <sup>b</sup>
	Residual	24.658	213	.116		
	Total	112.511	218			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), L, KA, SG, KI, PDKI

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa secara Bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa F sebesar 151.781 dengan signifikan 0,000 karena tingkat signifikansi < 0,05 ini berarti model regresi fit dengan data observasinya sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 8**  
Hasil koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.884 <sup>a</sup>	.781	.776	.3402406	1.849	

a. Predictors: (Constant), L, KA, SG, KI, PDKI

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Adjusted (R<sup>2</sup>) sebesar 0,776 atau (77,6%). Hasil ini menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independent, komite audit, kepemilikan institusional, sales growth dan likuiditas dapat menjelaskan 77,6% variabel tax avoidance dan sisanya 22,4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

### Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 2 sebelumnya, yang mana pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memiliki t hitung sebesar -19,076 dan

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama diterima.

Variabel komite audit (KA) memiliki t hitung sebesar -5,895 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua diterima.

Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki t hitung sebesar 0,094 dan nilai signifikansi sebesar 0,925 yang dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Variabel *sales growth* (SG) memiliki t hitung sebesar -0,608 dan nilai signifikansi sebesar 0,544 yang dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Variabel likuiditas (L) memiliki t hitung sebesar -1,141 dan nilai signifikansi sebesar 0,255 yang dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kelima ditolak.

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance***

Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama di terima. Tujuan di bentuknya komisaris independen adalah untuk mengawasi manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan menyeimbangkan kebijakan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajer perusahaan dalam membuat sebuah keputusan. Manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan, termasuk dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Manajer akan melaporkan beban pajak perusahaan secara wajar sehingga tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dihilangkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020), Astuti (2020) dan Alam dan Fidiana (2019) serta Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance***

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua di terima. Komite audit telah menjadi unsur dalam *Good corporate governance* dengan jumlah minimal tiga orang di dalam setiap perusahaan. Semakin banyaknya komite audit artinya semakin ketatnya pengawasan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan agar memiliki relevansi, kredibilitas dan independensi di dalamnya. Komite audit dalam perusahaan diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian Serafim dan Karmudiandri (2021), Nugraheni dan Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance***

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga di tolak. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang mengawasi perusahaan belum pasti dapat mengontrol dengan baik tindakan manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Seberapa besarpun kepemilikan perusahaan oleh institusi tidak akan memengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional menginterpretasikan besarnya pengawasan yang diterapkan terhadap manajemen.

Dalam penelitian ini besarnya kepemilikan tersebut tidaklah memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Manajemen kemungkinan menurunkan pajaknya melalui beban saat pembayaran dividen. Pada saat melakukan pembayaran dividen akan menimbulkan suatu beban yang mana beban tersebut itulah yang akan perusahaan manfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga hal ini menjadikan posisi kepemilikan institusional tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) dan Hidayat, *et al* (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Sales growth Independen terhadap Tax avoidance**

*Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat di tolak. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang tinggi tidak selalu menggambarkan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan laba yang tinggi pula, karena diikuti dengan efisiensi beban operasional yang dikeluarkan. Maka dari itu ketika penjualan meningkat maka beban yang dihasilkan pun otomatis akan meningkat pula, sehingga manajemen pada perusahaan tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dan Safitri dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Tax avoidance**

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima di tolak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya serta tingginya kas perusahaan yang menganggur sehingga tidak produktif. Sebaliknya, jika likuiditasnya rendah akan berdampak pada pinjaman modal yang akan diberikan kreditur ataupun investor pada perusahaan akan menurun karena ketidakpercayaan oleh penyedia dana. Sehingga, Perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya tidak terlalu tinggi agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek secara efektif dan tidak terlalu rendah mendapat kepercayaan penyedia modal. Jadi, tidak dimungkinkan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian Alam dan Fidiana (2019) yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

## **V. SIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajer perusahaan dalam membuat sebuah keputusan termasuk dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Manajer akan melaporkan beban pajak perusahaan secara wajar sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dihilangkan.

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya komite audit artinya semakin ketatnya pengawasan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan agar memiliki relevansi, kredibilitas dan independensi di dalamnya. Komite audit dalam perusahaan diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Seberapa besarpun kepemilikan perusahaan oleh institusi tidak akan memengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional menginterpretasikan besarnya pengawasan yang diterapkan terhadap manajemen. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang mengawasi perusahaan belum pasti dapat mengontrol dengan baik tindakan manajemen dalam praktik penghindaran pajak.

]Hal yang sama dengan *sales growth* yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak serta merta dapat menggambarkan peningkatan laba perusahaan, karena mengingat ada efisiensi beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu ketika penjualan me ningkat, maka beban yang dihasilkan pun otomatis akan meningkat pula, sehingga manajemen pada perusahaan tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak.

Begitu pula dengan Likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya tidak terlalu tinggi agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek secara efektif dan tidak terlalu rendah mendapat kepercayaan penyedia modal. Jadi, tidak dimungkinkan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Keterbatasan dalam penelitian yaitu pada penelitian ini tidak dapat mendeteksi secara langsung *tax avoidance* pada perusahaan hanya berdasarkan asumsi peneliti terdahulu yang diadopsi dari peraturan perundang-undangan mengenai perpanjangan. Pada Penelitian ini hanya dapat melihat

variabel apa saja yang dapat mempengaruhi tax avoidance. Sulitnya mencari buku mengenai penelitian yang dilakukan terbilang sangat minim sehingga penulis kesulitan dalam mencari literatur mengenai tax avoidance.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain karena dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yaitu Kepemilikan Institusional,

Sales growth dan Likuiditas. Besarnya tingkat ( $R^2$ ) sebesar 77,6% dan sisanya 22,4% mungkin variabel lain yang bisa membuktikan pengaruh terhadap tax avoidance. Diharapkan dapat menggunakan variabel lain seperti Kepemilikan Manajerial karena masuk ke dalam tata kelola perusahaan yang baik sehingga pengawasan akan perusahaannya pun juga meningkat Sehingga tindakan tax avoidance dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh manajemen laba, likuiditas, leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Anisa, C. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen Dan Likuiditas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2014)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unissula).
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831-1859.
- Astuti, Komang Ayuk. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 448-466.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Hidayat, D. W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.
- Hidayat, T., Ajengtiyas, A. A. A., & Ginting, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNIDA*, 8 (1), 49-64.
- <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Jacob, F. 2014. "An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development". *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol. 5, No. 18: pp. 22–27. Retrieved from www.iiste.org
- Jensen dan Meckling (1976). Theory of the firm : Managerial behavior, Agency cost and Ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 4, 305 – 360.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan moKeuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharimah, T. N., & Sutandi, S. (2019). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Untuk Menilai

- Tingkat Kesehatan Perusahaan Pada Pt. Harapan Jaya Lestarindo Tangerang. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 91-106.
- M.Hanafy dan Abdul Halim, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketujuh. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Noviani, I. R. (2018). *Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *eProceedings of Management*, 5(2).
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Pratiwi, Ni Putu Devi, 2019. Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales growth terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Putra, I Gede Khrisma, 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015 – 2017. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Putri, D. T. S. (2021). *Pengaruh political connection, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance: studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rist, Michael & Pizzica, Albert J. 2015. *Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions*. New York: Apress.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Sartono, Agus. 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2003). *Financial accounting theory* (Vol. 3, pp. 141-143). Toronto: Prentice hall.
- Serafim, j., & karmudiandri, a. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur di bei
- Subramanyam dan J. Wild. 2010. *Financial Statement Analysis*. Tenth Edition. McGraw Hill. London.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Tamara, Novia Dewi. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Trisianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan leverage sebagai variabel mediasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(1).
- Umam, M. F. S., & Ginanjar, Y. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Majalengka*, 3(1).
- Widarjo, W. (2010). *Pengaruh ownership retention, investasi dari proceeds dan reputasi auditor terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai variabel*

*pemoderasi* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Wulandewi, Gusti Ayu Diah, 2020. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan karakteristik Eksekutif terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.